



Article Informations  
Corresponding Email:  
aldistarian32@gmail.com

Received: 03/08/2024; Accepted:  
23/10/2024; Published: 23/10/2024

## **KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM MENYEPAKATI KERJASAMA INDONESIA-CHINA DALAM BIDANG EKONOMI DIGITAL TAHUN 2023**

**Aldistarian Prayusti<sup>1)</sup>, Yuswari O. Djemat<sup>2)</sup>, I Wayan Aditya  
Harikesa<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Jenderal Achmad Yani

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Indonesia dalam menyepakati kerja sama ekonomi digital dengan China pada tahun 2023. Menggunakan kerangka teori liberalisme, studi ini menilai manfaat serta kepentingan nasional yang dicapai Indonesia melalui kolaborasi internasional, khususnya dalam konteks ekonomi digital dan ekonomi internasional. Data sekunder dari berbagai sumber literatur digunakan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia memanfaatkan norma-norma liberalisme dalam kerjasama dengan China, sekaligus mempertahankan kepentingan nasionalnya. Kerjasama internasional di sini difokuskan pada aspek ekonomi digital yang meliputi pertukaran teknologi, investasi, dan inovasi digital. Penelitian mengidentifikasi bahwa selain memperkuat ekonomi digital dalam negeri, kerja sama ini juga berupaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara umum di era globalisasi. Aspek- aspek seperti iklim investasi yang lebih baik, keunggulan komparatif, dan transfer teknologi menjadi bagian dari strategi Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya di tingkat internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui pendekatan liberalisme, Indonesia berusaha untuk menciptakan keuntungan bersama dengan China sambil tetap memprioritaskan kepentingan nasional dalam hal keamanan ekonomi, pengembangan teknologi, dan peningkatan keterampilan dalam ekonomi digital. Ini menunjukkan adanya keseimbangan antara keterbukaan terhadap kerjasama internasional dan perlindungan terhadap interes nasional.

**Kata kunci:** Kepentingan Nasional, Kerjasama Internasional, Ekonomi Digital, Liberalisme, Ekonomi Internasional

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze Indonesia's national interest in agreeing to digital economic cooperation with China in 2023. Utilizing the theoretical framework of liberalism, this study assesses the benefits and national interests achieved by Indonesia through international collaboration, particularly in the context of the digital economy and international economics. Secondary data from various literature sources is used to explain how Indonesia leverages liberalism norms in its cooperation with China while maintaining its national interests. International cooperation here focuses on the aspects of the digital economy, including technology exchange, investment, and digital innovation. The research identifies that besides strengthening the domestic digital economy, this cooperation also aims to support general economic growth in the era of globalization. Aspects such as a better investment climate, comparative advantage, and technology transfer are part of Indonesia's strategy to enhance its competitiveness at the international level. The results of this study indicate that through a liberalism approach, Indonesia aims to create mutual benefits with China while still prioritizing national interests in terms of economic security, technological development, and enhancing skills in the digital economy. This demonstrates a balance between openness to international cooperation and the protection of national interests.*

**Keywords:** *National Interest, International Cooperation, Digital Economy, Liberalism, International Economics*

## **PENDAHULUAN**

Setiap negara berupaya untuk mewujudkan perekonomian yang baik untuk negaranya, namun sering kali upaya yang telah dilakukannya tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Dalam hal pertumbuhan perekonomian, terdapat beberapa upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kondisi perekonomian di negaranya seperti melakukan kerja sama bilateral dalam bidang perdagangan internasional, investasi, pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja dan lain sebagainya. Perdagangan internasional dan investasi merupakan salah satu aspek penting untuk suatu negara dalam menumbuhkan perekonomian di setiap negara. Negara yang menjadi pelaku perdagangan internasional dan investasi memiliki tujuan untuk menjalin dan menciptakan suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi dengan negara lain serta akan menciptakan pasar baru untuk masyarakat internasional. Keterbukaan kebijakan ekonomi dan stabilitas domestik pada saat awal periode reformasi pembangunan 1990 membuat Cina percaya diri dalam membangun ekonomi pasar sosialis. Keterbukaan ekonomi Cina juga membuat investasi teknologi atau pembangunan teknologi juga kian masif dengan

dijembatani pada *Chinese Foreign Cooperative Joint Venture*.

Perkembangan sektor ekonomi di Indonesia yang memasuki era ekonomi digital juga mengubah model bisnis yang ada. Model bisnis berubah dari model bisnis lama (old model), model bisnis baru (new model) yang kini sedang berjalan (existing) dan kemudian (future model) atau model masa depan. Ekonomi digital sebagai wujud ekonomi modern berbasis teknologi merupakan termasuk kedalam model bisnis baru (new model) yang kini sedang berjalan (existing). Dengan adanya perubahan model bisnis ini berdampak kepada perubahan lainnya seperti perubahan pada teknologi yang semakin canggih yang dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas bisnis, sistem jual beli online sangatlah fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman sehingga bisa dilakukan kapan dan dimana saja dengan hanya bermodalkan internet dan smartphone. Adanya internet ini sangat mempermudah komunikasi dan transaksi antar perorangan, badan usaha maupun pemerintahan. Dalam perkembangan ekonomi digital adanya perubahan pola bisnis yang terjadi karena perubahan konsumsi masyarakat yang lebih banyak mengandalkan internet.

Saat ini, pola konsumsi masyarakat mengalami pergeseran dari pola belanja dari toko ritel konvensional menjadi toko ritel online e-commerce atau marketplace. E-commerce memiliki potensi besar untuk memberi dampak pada perkembangan ekonomi, melalui publikasi INDEF (Institute for Development of Economic and Finance) tahun 2018 dengan total investasi mencapai 4,8 miliar dolar pada tahun 2017 e-commerce Indonesia memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,712% atau kurang lebih Rp. 93 triliun. Dilihat dari pertumbuhan PDB Indonesia. Kekuatan ekonomi digital Indonesia terletak pada pengguna Internet yang meningkat dan munculnya startup dengan status unicorn. Sementara itu titik kelemahan Indonesia ada pada infrastruktur telekomunikasi yang lambat, teknologi informasi yang masih tertinggal, keamanan cyber yang minim, serta SDM yang kurang mumpuni.

Disisi lain Indonesia memiliki peluang terhadap peningkatan ekspor produk UMKM, membuka lapangan kerja di bidang baru,

serta menarik lebih banyak investor untuk membangun ekonomi digital Indonesia. Adapun hambatan yang mengganggu pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yaitu minimnya jalur distribusi barang dan logistik, metode pembayaran belum terintegrasi, belum menggunakan sistem payment gateway serta belum jelasnya aturan pajak untuk e-commerce. Sedangkan kekuatan China terletak pada SDM yang kompetitif dan banyaknya jumlah wirausaha. Kelemahan China ada pada kesenjangan pendapatan antara masyarakat urban dan rural, serta banyaknya produk imitasi buatan China yang beredar, China memiliki peluang sebagai raja e-commerce dunia dengan banyaknya pengguna internet. Tetapi China juga memiliki hambatan yang terletak pada pembatasan penggunaan internet yang terlalu di proteksi oleh pemerintah China. Fokus masalah dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada kepentingan nasional Indonesia dalam kerja sama the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on E-Commerce Cooperation atau kerja sama antara Indonesia dan China dalam bidang ekonomi digital.

Liberalisme merupakan aliran pemikiran yang berorientasi pada kebebasan individu, menghormati kemerdekaan setiap orang, meyakini bahwa tugas pokok negara adalah melindungi kebebasan warganya seperti kebebasan berfikir, berekspresi dan kepemilikan. Aliran ini memandang bahwa manusia dengan seluruh akal nya mampu memahami segala sesuatu. Dengan kata lain aliran ini dibangun di atas prinsip sekuler yang mengangungkan kemanusiaan dan berpandangan bahwa manusia dapat dengan sendirinya mengetahui segala kebutuhan hidupnya. Selain itu beberapa tokoh juga memberikan pengertian tentang liberalisme. Pertama, liberalisme dalam artian Dunne sebagai sebuah ideologi yang menjunjung tinggi kebebasan individu.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer dan sosial-budaya. Berdasarkan dengan pandangan politik luar negeri K.J Holtsi, antara satu negara dengan negara lainnya masih tetap bisa saling berinteraksi bahkan

memiliki hubungan walaupun tidak adanya hubungan secara resmi yang disepakati. Negara akan melakukan apa saja jika menyangkut dengan kepentingannya.

Konsep kerja sama internasional merupakan suatu fokus teori yang terdapat didalamnya, sesuai dengan pembahasan teori hubungan internasional mengenai kondisi dan penyebab negara dengan negara lain. Hal yang sangat mustahil bagi suatu negara dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga tercipta situasi kerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Aktor negara akan menjalin hubungan kerja sama yang dapat diartikan bahwa negara-negara tersebut telah menyetujui seperangkat aturan, regulasi, norma serta prosedur lainnya dengan harapan kepentingan nasional para aktor tak hanya bertemu dalam lingkup hubungan internasional, tetapi juga dapat diwujudkan bersama-sama.

Konsep ekonomi digital pertama kali dikemukakan oleh Don Tapscott, merupakan suatu sosiopolitik dan sistem ekonomi dengan karakteristik sebagai ruang intelijen, meliputi berbagai akses instrumen informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi. Pengolahan ekonomi digital yang pertama diidentifikasi adalah industri teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), aktivitas e-commerce, dan distribusi barang dan jasa secara digital. Konsep ekonomi digital yang dikemukakan oleh Don Tapscott adalah sistem ekonomi yang kompleks dan merupakan fenomena yang baru muncul terkait aspek-aspek ekonomi mikro, makro, serta teori organisasi dan administrasi.

Ekonomi politik internasional merupakan salah satu sub disiplin dalam ilmu hubungan internasional yang secara khusus menguraikan dan menerangkan tentang masalah perekonomian dalam sistem internasional seputar interaksi, interplay, interrelated dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor politik dengan ekonomi dalam lingkup hubungan internasional yang melibatkan negara dengan pasar. Keterkaitan antara negara dan pasar sangat kuat semenjak revolusi industri pada abad ke-16 dalam sistem internasional dalam kebutuhan ekonomi yang meliputi sumber energi, kebutuhan bahan mentah, tenaga kerja, teknologi dan pasar

menjadikan hubungan antara negara dan pasar sangat sulit dipisahkan. Dinamika ekonomi politik internasional merupakan sebuah interaksi timbal balik untuk upaya pengejaran kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan internasional.

Tipe penelitian deskriptif akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan yang telah dikumpulkan. Data

tersebut akan peneliti analisis sedalam mungkin namun masih sesuai dengan bentuk aslinya sehingga setiap bagian harus ditelaah satu demi satu. Tipe penelitian ini sangat sesuai sebagai pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitian dengan judul yang diangkat.

Metode penelitian kualitatif menjadi salah satu metode yang dipilih peneliti untuk membahas permasalahan yang dikaji, peneliti sendiri mengumpulkan data maupun informasi melalui studi pustaka, dokumentasi ataupun wawancara, pada umumnya observasi ini bersifat Open ended, dimana peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada partisipan yang memungkinkan dan memberikan pandangan mereka instrumen menjadi pilihan peneliti sebagai data kualitatif untuk mengumpulkan dokumentasi observasi perilaku maupun wawancara dengan cara menggunakan kuesioner ataupun instrumen yang dibuat oleh peneliti lain. Studi kepustakaan, usaha mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan data sekunder, terutama dari buku- buku, tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, artikel- artikel yang terdapat dalam media massa maupun data-data yang didapat dari sumber lainnya. teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan mengenai serangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti sebagai dari proses pencarian data penelitian, metode penting dalam penelitian sosial, terutama metode kualitatif.

Reduksi data menurut Miles dan Huberman merupakan bagian awal peneliti untuk dapat menganalisis sebuah data atau proses. Bagaimana merangkum atau memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan topik penelitian, hingga akhirnya memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data hingga mendapatkan keterkaitan dengan tema yang diangkat terhadap data tersebut. Sehingga diperlukannya reduksi data disini untuk mendapatkan data yang tidak menumpuk dan tidak mempersulit peneliti dalam menganalisis.

Pada penyajian data selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian menurut Miles dan huberman dilakukan dalam bentuk Uraian singkat seperti bagan, naratif, matrik dan grafik, dengan tujuan agar penyajian informasi dapat tersusun. Hubungan antar

kategori dalam penyajian data memungkinkan untuk peneliti menggunakan data display karena untuk memperlihatkan studi kasus yang diangkat oleh penelitian mengenai kasus yang diangkat. Dengan memberikan kemungkinan peneliti untuk menarik dan mengambil tindakan terhadap data tersebut.

Langkah akhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi pada penelitian yang diangkat dapat menyimpulkan di awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah ketika bukti di lapangan sudah diketahui. Apabila kesimpulan dilakukan di awal dan didukung oleh bukti-bukti yang tervalidasi maka penarikan kesimpulan yang dikemukakan adalah kredibel.<sup>33</sup> Namun setelah data masuk terus-menerus dan dianalisis tentang kebenaran, dengan demikian peneliti dapat mengklasifikasikan dan menyajikan data serta menarik kesimpulan sebagai analisis kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

Dalam konteks geopolitik, posisi Indonesia semakin sentral dan untuk itu Indonesia perlu meningkatkan kerja sama strategis dengan berbagai negara di berbagai sektor ekonomi. Namun, tingkat kematangan regulasi TIK di Indonesia masih tertinggal, Indonesia mendapat peringkat G2 sementara Singapura sudah mencapai peringkat G4. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia harus mendorong hubungan strategis yang seimbang dan menekankan posisi diantara berbagai negara, serta mempromosikan regulasi TIK yang mendukung persaingan dan inovasi, memberikan akses yang lebih besar, dan menjaga hak-hak konsumen di seluruh pasar telekomunikasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih aktif berperan dalam geopolitik global dan meningkatkan daya saing dalam sektor ekonomi digital.

Institusi keuangan Cina dan bank komersial asing juga selanjutnya menjadi pemain penting dalam memfasilitasi keuangan jalur sutra BRI. Menyikapi perkembangan yang ada saat ini, Indonesia semestinya dapat memperoleh lebih banyak investasi di masa depan, khususnya di bidang infrastruktur guna membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa proyek

seperti infrastruktur pelabuhan dan transportasi laut dapat menjamin adanya produksi berkelanjutan di bidang sumber daya maritim. BRI menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat hubungan dengan Cina dan menjamin tersedianya pendanaan bagi proyek-proyek infrastruktur. Seperti disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia harus secara proaktif turut serta dalam inisiatif BRI, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan melakukan hal tersebut, Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari BRI, untuk selanjutnya mampu memimpin pertumbuhan ekonomi terutama di kawasan ASEAN.

Antitesis dengan pernyataan di atas, bagi Cai dari Lowy Institute, Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki keterbatasan untuk menentukan sendiri skema pengerjaan proyek karena pinjaman dana dari Cina. Cina juga terlibat dari mulai awal survei hingga pengerjaan proyek selesai. Pemerintah Indonesia pada akhirnya harus mengikuti berbagai regulasi yang diterapkan Cina, mulai dari Chinese standards, Chinese technology, dan Chinese equipment. Dharma Negara dan Suryadinata menelaah dari sisi ekonomi dan sisi politik. Dari sisi ekonomi, keduanya mengkaji bahwa Pemerintah Indonesia melihat BRI sebagai peluang ekonomi untuk memperoleh investasi Cina. Sementara Cina lebih tertarik untuk mempromosikan perdagangan dan pembangunan infrastruktur, baik di home country maupun host country. Keduanya menilai, bahwa proyek Indonesia dan Cina melalui BRI kurang optimal. Pada kenyataannya, banyak proyek kedua negara hanya terkait dengan eksploitasi bahan baku yang dibutuhkan oleh Cina dan perluasan perusahaan Cina untuk memperoleh akses pasar dan konsumen berpenghasilan menengah (middle income consumers) di Indonesia.

Keduanya mengkaji lebih dalam, bahwa Indonesia tidak memperoleh sepenuhnya aktivitas transfer of knowledge dan transfer of technology dari Cina untuk mengembangkan infrastruktur. Sementara di satu sisi, Cina memiliki modal yang besar dan teknologi mutakhir. Kemudian, Dharma Negara dan

Suryadinata juga menekankan, bahwa tidak semua proyek BRI selaras dengan kepentingan nasional Indonesia. Namun Pemerintah Indonesia menerima berbagai proyek tersebut dikarenakan urgensi pembangunan yang cukup tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Perkembangan pusat data dan ekosistem cloud di Indonesia masih mengalami kendala. Pada tahun 2020, kapasitas pusat data Indonesia hanya mencapai sekitar 1 MW per satu juta populasi, sementara negara-negara lain seperti Singapura dan Jepang memiliki kapasitas pusat data mencapai sekitar 80 MW dan 24 MW per satu juta populasi.

Selain itu, berdasarkan Global Cloud Ecosystem Index, pada tahun 2022 Indonesia berada di peringkat ke-56, sementara negara-negara lain seperti Singapura, Jepang, dan Thailand berada pada peringkat yang lebih tinggi, masing-masing ke-1, ke-15, dan ke-42. Dalam indeks tersebut, nilai terendah Indonesia terletak pada pilar keamanan dan jaminan (security and assurance). Artinya Indonesia perlu fokus untuk membangun lingkungan peraturan yang matang yang mempromosikan keamanan dan kedaulatan data yang maju secara progresif. Di sisi lain, ketersediaan pasokan energi yang merupakan prasyarat dalam pengembangan infrastruktur TIK juga belum mencukupi sehingga menghambat kemajuan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.

Iklim bisnis di Indonesia masih berada dalam tahap awal perkembangannya. Berdasarkan Worldwide Governance Indicators (WGI), Indonesia masih menduduki peringkat 60 ke atas untuk indeks Lingkungan Bisnis dan Indeks Tata Kelola Dunia. Artinya Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekosistem bisnisnya melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung serta kesiapan dalam mengadopsi teknologi. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah struktur usaha di Indonesia, dimana sekitar 99% adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, tingkat adopsi teknologi di kalangan UMKM baru mencapai sekitar 32%. Salah satu dampak dari rendahnya tingkat adopsi teknologi digital adalah kontribusi UMKM terhadap PDB di Indonesia yang terbatas atau hanya sekitar 60%. Untuk meningkatkan kontribusi ekonomi UMKM, diperlukan upaya mendorong

penggunaan teknologi digital, pemberian pelatihan, akses yang lebih baik ke sumber daya digital, serta meningkatkan kesadaran tentang manfaat teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan usaha.

Dua faktor utama penyebab rendahnya jumlah tenaga profesional di bidang digital/ TIK di Indonesia: Pertama, terdapat kesenjangan signifikan dalam tingkat pendidikan dasar. Dalam satu dekade terakhir, peringkat PISA (Program for International Student Assessment) Indonesia terus mengalami penurunan yang konsisten. Pada tahun 2018, skor PISA Indonesia untuk sains berada di peringkat 71 dari 79 negara. Selain itu, tingkat partisipasi dalam pendidikan tinggi juga masih rendah. Pada tahun 2022, hanya sekitar 36% dari penduduk Indonesia yang melanjutkan pendidikan ke universitas. Kualitas perguruan tinggi nasional juga belum mencapai standar optimal. Pada tahun 2023, hanya ada tiga universitas nasional Indonesia yang masuk dalam peringkat teratas universitas global. Di sisi lain, alokasi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 pengeluaran tersebut mencapai Rp. 508 triliun atau sekitar 20% dari alokasi anggaran belanja tersebut, namun jauh tertinggal dibandingkan negara lainnya. Berdasarkan persentase terhadap PDB alokasi belanja pemerintah untuk Pendidikan pada tahun 2022 hanya mencapai 2,8%, sedangkan Malaysia mengalokasikan sekitar 3,9% dari PDB dan Korea mencapai 4,5% dari PDB.

Oleh karena itu, langkah esensial yang perlu diambil untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat Sumber Daya Manusia dalam bidang digital, yaitu peningkatan dalam pendidikan dasar, promosi pendidikan tinggi, dan peningkatan mutu perguruan tinggi. Kedua, keterbatasan pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pendidikan. Lebih dari 50% sekolah di Indonesia belum memiliki akses internet. Selain itu, investasi pemerintah di bidang teknologi pendidikan (edtech) kurang dari 1% dari total pengeluaran di bidang pendidikan. Akibatnya, penetrasi Edtech masih terkonsentrasi di daerah Jawa. Di sisi lain, kurang dari 30% perusahaan teknologi pendidikan yang memperluas bisnisnya di luar Jakarta. Secara global Indonesia menduduki peringkat ke-47

dari 134 negara berdasarkan Digital Skills Gap Index (DSGI). Artinya Indonesia memiliki sejumlah keunggulan tetapi masih menghadapi sejumlah tantangan dalam literasi digital.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa sekitar 47% orang Indonesia membutuhkan pelatihan kembali/peningkatan keterampilan dengan fokus pada pemikiran kreatif, AI, big data, dan keterampilan berpikiran analitis. Pembelajaran daring akan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pelatihan kembali dan peningkatan keterampilan karyawan. Hal ini khususnya berlaku untuk keterampilan yang berhubungan dengan komputasi awan (cloud computing) dan keterampilan teknik lainnya. Dengan bantuan pembelajaran daring, karyawan dapat memperoleh keterampilan tersebut dalam waktu singkat. Dalam konteks pelatihan karyawan yang terus berubah, pembelajaran daring menawarkan efisiensi waktu yang tinggi dan memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan cepat dengan tuntutan industri yang terus berkembang. Pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, dan individu perlu berkolaborasi dalam menyediakan pelatihan tersebut dan memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia tetap kompetitif dan siap menghadapi perubahan dalam ekonomi yang semakin terdigitalisasi. Tentunya ini membutuhkan investasi dalam program pelatihan yang relevan, sumber daya pendidikan yang mutakhir, dan akses yang lebih luas ke pembelajaran daring.

Meskipun terjadi peningkatan peringkat dalam kemampuan inovasi Indonesia, harus diakui bahwa kinerja tersebut masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Terutama, Indonesia masih mendapat nilai terendah dalam Sub Peringkat Penciptaan Pengetahuan Subperingkat ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah paten lokal, artikel ilmiah dan model teknologi, serta dokumen lain yang dapat dikutip dan dihasilkan secara lokal. Selain peringkat yang masih tertinggal dalam Sub- Peringkat Penciptaan Pengetahuan, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam beberapa aspek kunci lainnya terkait kemampuan inovasi. Salah satunya adalah pengeluaran R&D sebagai persentase dari PDB, ketersediaan talenta R&D (peneliti), dan jumlah unicorn lokal. Pada tahun 2022, pengeluaran R&D

Indonesia hanya mencapai 0,3% dari PDB, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura yang menghabiskan 1,9% dari PDB mereka untuk R&D, dan India yang mengeluarkan 0,7% dari PDB mereka untuk hal yang sama.

Selain itu, kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan insentif untuk R&D juga terbatas, terutama dalam hal pajak dan subsidi. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyiapkan berbagai model insentif R&D yang dapat menarik investasi dalam inovasi digital. Hal ini dapat mencakup pengembangan kebijakan pajak yang lebih menguntungkan bagi perusahaan yang berinvestasi dalam R&D, pemberian subsidi atau hibah untuk proyek R&D yang inovatif, serta upaya untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang berkualifikasi dalam bidang penelitian dan pengembangan. Dengan melakukan upaya ini, Indonesia dapat memperkuat kemampuan inovasi dan bersaing lebih efektif dalam pasar global. Inovasi Startup saat ini menjadi daya tarik tersendiri untuk pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, masing-masing bergerak di bidang travel, on demand, hingga e-commerce. Produk dari masing-masing startup sangat berhubungan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, mulai dari ojek online, tiket pesawat dan hotel sampai ke pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang di tawarkan oleh platform e-commerce. Indonesia sendiri memiliki empat startup berstatus unicorn diantaranya yaitu Gojek, Tokopedia, Bukalapak dan Traveloka.

Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal penanaman modal, terutama terkait dengan pengembangan ekonomi digital. Pada tahun 2021, alokasi pengeluaran pemerintah di Indonesia hanya mencapai 16% dari PDB, jauh dari rata-rata negara-negara lain yang mencapai 23%. Kurangnya alokasi dana pemerintah memengaruhi kemampuan negara untuk mendukung sektor inovasi dan pengembangan ekonomi digital. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan revisi peraturan-peraturan investasi yang bersifat restriktif guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan ramah terhadap investasi asing. Melalui upaya ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi lebih menarik bagi investor asing yang pada gilirannya berdampak pada

pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pendanaan VC di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan, dengan CAGR mencapai 18% selama periode 2018 hingga 2021.

Pada tahun 2021, pendanaan VC di Indonesia dari sumber global berhasil mencapai 1,4%, sebanding dengan sebagian besar negara-negara lain sebagai tolak ukur, kecuali Amerika Serikat dan Inggris Raya. Meskipun terjadi peningkatan yang positif, penanaman VC sebagai persentase terhadap PDB di Indonesia hanya mencapai 0,1%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara sebagai tolak ukur, yang dapat mencapai 2-6 kali lipat dari persentase tersebut. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan investasi VC. Guna mendorong pendanaan VC, upaya yang perlu dilakukan yaitu menciptakan insentif yang lebih menarik bagi investor dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada startup. Upaya ini akan mendorong lebih banyak peluang bagi perusahaan-perusahaan inovatif dan mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi digital di Indonesia.

Pada tahun 2022, pangsa pasar ekonomi digital Indonesia di kawasan Asia Tenggara telah mencapai 40%, menjadikan Indonesia sebagai pemimpin pasar di kawasan tersebut. Prestasi ini mencerminkan pencapaian yang luar biasa dan menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menjalankan peran sebagai market leader dalam industri ekonomi digital. Pencapaian-pencapaian ini membentuk landasan yang kuat untuk Indonesia dalam mencapai aspirasi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkemuka di dunia pada tahun 2045. Dengan komitmen yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai posisi yang diharapkan dalam tataran global. Indonesia saat ini juga menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, dan pada tahun 2030, jumlah populasi usia produktif diperkirakan mencapai 69%. Selain itu, jumlah masyarakat berpendapatan menengah juga meningkat dan jumlah pengguna internet telah mencapai 215 juta, menjadikan Indonesia cukup tampil dalam hal konektivitas digital di Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan struktur demografi yang produktif,

digitalisasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam semua sektor pembangunan, mulai dari sektor-sektor prioritas hingga pelayanan publik.

Hal ini juga membuka peluang untuk memanfaatkan tenaga kerja digital yang berkualitas guna menciptakan industri-industri vertikal yang modern, produktif, dan terkini. Adopsi teknologi yang lebih luas di berbagai sektor pembangunan juga akan mengurangi ketergantungan pada produk dan layanan digital impor. Pada akhirnya, hal ini akan menjadi pendorong dalam meningkatkan produktivitas, upah, dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Peningkatan manfaat ekonomi digital akan berdampak positif pada kesejahteraan dan daya saing Indonesia di tingkat global. Perkembangan digital memunculkan ancaman berupa cyber crime dan cyber war yang mengancam keamanan individu berupa teraksesnya asset dan data pribadi seperti pencurian identitas dan data, pembajakan akun, penyebaran virus melalui website dan kode-kode penting, fitnah, pencemaran nama baik. Tidak hanya berbahaya bagi individu tetapi juga bagi negara dengan adanya spionase industri dan pencurian data informasi penting, dan penyebaran kabar hoaxes dengan tujuan provokasi (Iwan, 2012). Ekonomi pertahanan bertujuan untuk menciptakan pertahanan dan keamanan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi digital serta peran ekonomi pertahanan dalam menghadirkan keamanan ekonomi ditengah masyarakat. Oleh sebab itu Kementerian Pertahanan RI meluncurkan Program Sisfohaneg (Sistem Informasi Pertahanan Negara).

Sisfohaneg memiliki peran sebagai penyedia data dan informasi secara cepat, akurat, dan real time sehingga memberikan jaminan keamanan dalam proses penetapan kebijakan keputusan. (Pusdatin Kemhan, 2021). Prioritas utama yang dilakukan oleh Sisfonaneg adalah sistem jaringan komunikasi data, sistem aplikasi, updating data online, sistem keamanan data/sandi, pembinaan SDM/TIK. Program tersebut dikembangkan dalam rangka mendukung terciptanya ekonomi digital yang terjamin keamanannya dan juga sebagai wujud berjalannya ekonomi pertahanan. Sesuai dengan konsep ekonomi pertahanan yang

menjelaskan bahwa ekonomi pertahanan adalah cabang ilmu ekonomi pada masalah pertahanan negara. Ekonomi pertahanan memberikan produktivitas dan inovasi yang membawa pada perkembangan dan kemajuan teknologi militer dan non militer yang tidak terpisahkan khususnya pada ekonomi digital. (Supandi, 2019). Pembangunan digital yang memunculkan permasalahan berupa serangan siber berbasis malware dapat diantisipasi dengan kebijakan menjaga stabilitas keamanan nasional. Strategi yang dikembangkan adalah dengan penguatan ketahanan dan keamanan siber. Keberhasilan kebijakan ini dapat diukur dengan indikator skor global yaitu Cyber Security Index dengan nilai 0,85 pertahun. Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan kemampuan menghadapi serangan siber, dan adanya integrasi penanggulangan serangan siber. Kebijakan sistem pemerintah berbasis elektronik dikembangkan untuk menghadapi isu strategis pelayanan publik yang berkualitas. Strategi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan TIK dalam pelayanan publik dan manajemen institusi.

Keberhasilan kebijakan ini diukur dengan indikator indeks pelayanan publik sebesar 3,25.

1. Strategi lain yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang pembentukan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) yang bertugas dalam menjamin keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber nasional. BSSN menetapkan dua kerangka dalam Strategi Keamanan Siber Nasional. (SKSN) BSSN terbagi dalam dua kerangka yaitu: 1. Secara Internal Strategi internal dilakukan dengan efek pencegahan atau penangkalan dengan membangun sistem dan kekuatan.
2. Secara eksternal Strategi secara eksternal dilakukan dengan kebijakan Omny Direction Policy terbuka dan ke segala arah yang efektif dan mempunyai daya tangkal tinggi. SKSN BSSN ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga jaringan infrastruktur pemerintah dan TIK nasional; segala data baik

pemerintah, pribadi, penduduk, industry; turut memajukan ekonomi digital, daya saing dan ekonomi siber; mncerdaskan dan membangun karakter SDM bangsa Indonesia dalam ruang siber; Serta melaksanakan ketertiban dunia melalui pemanfaatan TIK untuk perdamaian tanpa intervensi. Strategi tersebut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam aspek ekonomi pertahanan yang akan memberikan jaminan rasa aman dalam melakukan transaksi melalui media digital. Peran penting bidang ekonomi pertahanan dalam terjaminnya akses informasi untuk setiap individu, menciptakan kepekaan dan kesadaran terhadap ketahanan dan keamanan ruang siber, jaminan keamanan akan data pribadi warga negara dan penduduk Indonesia, tercapainya peningkatan kapasitas dan daya saing nasional untuk tumbuh kembangnya ekonomi.

## **KESIMPULAN**

Kepentingan nasional Indonesia dalam menjalin kerjasama terakomodasi dalam MoU dan putaran perundingan kerja sama. Yakni tertuang dalam sektor sektor yang dikerjasamakan, karena terdapat kepentingan inti, jangka menengah dan jangka panjang yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menjalin kerja sama kemitraan ekonomi dengan China. Secara umum kepentingan nasional Indonesia yang ingin dicapai dari kerjasama dapat dibuktikan melalui pencapaian Indonesia dalam unsur yang dikerjasamakan. Kepentingan inti Indonesia yaitu untuk memperthankan kedaulatandan keamanan siber nasional. Untuk kepentingan jangka menengah Indonesia yaitu peningkatan SDM, ekspansi ekonomi dan intestasi. Untuk kepentingan jangka panjangannya adalah pembangunan ekonomi global dan stabilitas global Berdasarkan kepentingan- kepentingan tersebut, peneliti menilai bahwa kepentingan nasional Indonesia menjalin kerja sama dengan China ini bersifat ekonomi politik. Indonesia melakukan kerja sama ini dengan efektif dalam memanfaatkan setiap peluang yang terdapat dalam kerja sama tersebut untuk memaksimalkan kepentingannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **Buku**

- Creswell (2019) "Research Design Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran". (Yogyakarta: Pustaka Belajar).
- Hasyim (2016) "Ekonomi Makro" (Jakarta: Kencana. 2016) Hal. 231
- Herbert Giersch (1968) "Politik Ekonomi" (Jakarta: Kedutaan Besar Jerman).
- K.J. Holsti, "Politik International: Suatu Kerangka Analisis (terjemahan Wawan Juanda), cetakan I, Jakarta: Bina Cipta, 1987, Hal. 156. Diakses pada 21 Februari 2024
- K.J. Holsti (2014) "Politik Internasional Untuk Kerangka Teoritis" (Yogyakarta: Balai Layanan Perpustakaan) Hal 52. Diakses pada 21 Februari 2024
- James E. Dougherty dan Robert L (1986)
- Longman, "*Contending Theories of The international Relation : A Comprehensive Survey*" (New York).
- Miles dan Huberman (1994) "Qualitative Data Analysis" (United States: Sage Publications).
- Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi (2012) "International Relations and Politics, Pearson Education, 5th ed" (USA: Pearson Education).
- Robert Jackson dan George Sorensen (2014) "Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan pendekatan" (Yogyakarta: Pustaka Belajar).

- Sugiyono (2007) "Metode Penelitian Pendidikan" (Bandung: Alfabeta).
- Vinsensio Dugis (2016) "Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik" (Surabaya:Cakra Studi Global Strategis).
- Yanuar Ikbar (2006) "Ekonomi Politik Internasional-Konsep dan Teori Jiid 1" (Bandung:Refika Aditama).
- Yanuar Ikbar (2007) "Ekonomi Politik Internasional Konsep dan Teori Jilid 2" (Bandung:Refika Aditama).

## **Jurnal**

- Abu Faqih Hanifah & Rusdiyanta (2018) " Strategi Cina dalam Mewujudkan Hegemoni Ekonomi di ASEAN Melalui E-Commerce" Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy Vol 2 No 2 Universitas Buudi Luhur 138
- Andika, M. T., & Aisyah, N. (2017) " Analisis Politik Luar Negeri Indonesia- China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? Indonesian Perspective " 2(2), 161-179.  
doi:10.14710/ip.v2i2.18477
- Anggi Septia Gustrinaldi (2020) " Kepentingan Indonesia Dalam Menyepakati *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Dengan The European Free Trade Association (EFTA) Tahun 2017-2019*" JOM FISIP Vol 7 : Edisi II Universitas Riau
- Iasya Mardhiyyah dan Dadan Suryadipura (2023) " Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pada Masa Kabinet Kerja 2014-2019" Padjajaran  
Journal of International Relations (PADJIR) Vol 5 No 1 Universitas Padjadjaran.
- Salim, W & Negara, S. D (2018) " *Infrastructure Development under the Joko Widodo Administration: Progress, Challenges and Policies*" Journal of  
*Southeast Asian Economies*, 35(3), 386-401.

## **Website**

- Afifah Rahma (2022) " 4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli." Internet  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6073440/4-teoripertumbuhan-ekonomi-menurut-para-ahli>.
- BAPPEDA (2015) "Mewakili Indonesia pada The 12th China Expo Nanning, Guangxi China, Menteri Perdagangan: Riau Luar Biasa" (Internet)  
<https://bappeda.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/289/2015/09/19/mewakiliindonesia-pada-the-12th-china-exponanning,-guangxi-china,-menteriperdagangan:-riau-luar-biasa>
- Beijing, K (2018) "KBRI Beijing Dorong Kerja Sama Bisnis melalui Indonesia- China Business Forum on Investment and Trade" (internet)  
<http://kagama.co/2018/09/28/kbri-beijingdorong-kerja-sama-bisnismelaluiindonesia-china-business-forum->

oninvestment-and-trade/4/

- Beijing, K (2019) “Eratnya Kemitraan Strategis RI – RRT dalam Pesona Wonderful Indonesia” (Internet) <https://kemlu.go.id/beijing/id/news/2128/eratnya-kemitraan-strategis-ri-rrtdalampesona-wonderful-indonesia>
- BRIN (2017) “IndonesiaTiongkok Perkuat Kerja Sama Bilateral Bidang Pendidikan Tinggi ” (Internet) <https://www.brin.go.id/indonesiationgkokperkuat-kerja-sama-bilateral-bidangpendidikan-tinggi/>
- Moleong, L. J. (2012). Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Musafak. (2012). Budaya Ekonomi Digital Kalangan Masyarakat Menengah Atas. Yogyakarta: Universitas Gunadarma.
- Pusdatin Kemhan. (2021, 2 11). Retrieved from Pusdatin Kemhan <https://www.kemhan.go.id/pusdati>
- Rahmawati. (2017). Analisis Manajemen Resiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Peningkatan Cyber Defence . Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Vol. 7, No. 2, 51-63.
- Scholte, J. (2000). Globalization: A Critical Introduction. London: Palgrave.
- Straubhaar, J. d. (2002). Media Now: Communication Media in the Informatio Age. Australia: Wadsworth 139
- Guangzhou, K (2017) “Laporan Kinerja 2017 Konsulat Jenderal Republik Indonesia Guangzhou” (Internet) <https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9LSlJlJlJlR3Vhbmd6aG91JTlwLSUyMExhcG9yYW4lMjBLaW5lcmpHJTlMjAxNyUyMCo1MjBmaW5hbC5wZGY=>
- Falah, I (2016) “Produk Indonesia Lari Manis di CAEXPO 2016 ” (Internet) <https://infopublik.id/read/17238-produkin-donesia-laris-manis-di-caexpo-2016.html>